

DAFTAR PUSTAKA

- Attamimi, A. Hamid S. 1991, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-IV*, hal.287-291. Disertasi Hukum Tata Negara, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta. 1991 dalam Jimly Asshiddiiqie.1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Internas, Jakarta.
- Dwidjowijoto, Nugroho. Riant. 2000, *Otonomi Daerah, Desentralisasi tanpa Revolusi: kajian dan kritik atas kebijakan Desentralisasi di Indonesia*,Cetakan Pertama, PT.Elex Media Komputindo kelompok Gramedia, Jakarta.
- Elock,Howard.1982, *Local Government: Politician*. Greenwich, Connecticut, Fawcett Publication,Inc.
- Hadari,Nawawi dan Martini, 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada university Press, Yogyakarta.
- Hadjon,Philipus,M;Martosoewignjo,Soemantri,Sri;Basah,Sjachran;Manan,Bagir;Marzuki,Liaca.H;Berge ten, J.B.J.M; Buuren,Van.P.J,J;Stroink,F.A.M;2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan kedelapan, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Hamdi,Muchlis.2003.*Kajian Otonomi Daerah dalam perpektif Manajemen Pemerintahan Daerah,Demokrasi dan otonomi Daerah*,jurnal ilmu politik Pasca Sarjana Universitas Riau,volume 1/Nomor 1/juni/2003.hal.20-31.
- Kansi,C.S.T dan Kansil, S.T. 2004, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*,Cetakan Kedua, September 2004, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Kusnardi Moh.dan Ibrahim, Harmaily.1983,*Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara*.FH UI, Jakarta dalam Morissan. 2005. *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, Ramdina Prakarsa, Jakarta, Indonesia.
- Maddick, Henry. 2004, *Desentralisasi dalam Praktek*, Cetakan Pertama, April 2004, Pustaka Kendi, Yogyakarta.

- Mahfud,MD.1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, cetakan pertama, Maret 1999, Gramedia, Yogyakarta.
- _____2000,*Demokrasi dan Kontitusi di Indonesia: Studi tentang Inter Aksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Manan, Bagir. 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan ketiga, hal.26,32,34,35,37.Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum,Universitas Islam Indonesia, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- _____1994, *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*,Cetakan Pertama,Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Morissan. 2005. *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, Ramdina Prakarsa, Jakarta, Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru I)*, Cetakan Pertama.Mei 2003, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif.2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*,Cetakan Pertama, PT.Grasindo,Jakarta.
- Osborne, David. dan Gaebler, T. 2003. *Mewirauahakan Birokrasi (Reinventing Govenment) Mentransformasi Semangat Wirausaha kedalam Sektor Publik*, (edisi terjemahan) Cetakan ketujuh, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Osborne dan Plastrik. 1997, *Prasyarat Manajemen. dalam Otonomi Daerah, Desentralisasi tanpa Revolusi:Kajian dan Kritik atas kebijakan Desentralisasi di Indonesia*,Cetakan Pertama, PT.Elex Media Komputindo kelompok Gramedia, Jakarta.
- Page,Edward.C.dan Goldsmith,Michael.J.(eds). 1978, *Central and Local Governmnet Relation, A Comperative Analysis of West European Unitary States*, London. SAGE, Publictions.
- Ridwan, HR. 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan kedua, UII Press, Yogyakarta.
- Riwu, Kawo. Josef. 2003, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Cetakan ke-tujuh, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rondinelli,Dennis.A.and Shabir, Cheema.G. 1983. *Decentralization and development :Policy Implementation in Development Countries*, London, SAGE. Publications.

- Rosenblom, David.H.1993, *Public Administration: Understanding Management Politics and Law in the Public Sector*.3rd. Edition, New York,Mc Graw-Hill,Inc.
- Smith, Brian C. 1985, *Decentralization: The Territorial of The State*, Allen & Unwin, London.
- Soehino. 2003, *Hukum Tata Negara, Proyek Percontohan Otonomi Daerah, Peletakan Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II, dan Rekomendasi Kebijakan Serta Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Edisi Pertama, hal.172-173,BPFE-YOGYAKARTA.
- Sumardjono, dan Maria, SW. 1989 *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, FH UGM,Yogyakarta.
- Surakhmad, W. 1994. *Pengantar Penilitan Ilmiah*. Tarsito, Bandung.
- Syafiie,Inu,Kencana.1998. *Manajemen Pemerintahan*, Cetakan pertama, PT.Pertja, Jakarta.
- The Liang Gie. 1968, *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia: Suatu Analisa tentang Masalah-masalah Desentralisasi dan cara-cara Penyelesaiannya*. Gunung Agung, Jakarta.
- Wasistiono,Sadu. 2003. *Kapita Selektta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Cetakan keempat, CV.FOKUSMEDIA, Bandung.
- Wolman, Harold. 1990. *Decentralization: What it is and Why We Should Care,dalam Decentralization Local Government, and Markets: Toward a Post Welfare Agenda*, Robert J. Bennett (ed), Oxford, Clarendon Press.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, Hasil Amandemen Ke-Dua, 11 Mei 2004.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

_____ Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890). Citra Umbaran. Bandung.

_____ Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Negara RI Nomor 193 Tahun 2000; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014) Citra Umbaran. Bandung

_____ Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 194; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4015). Citra Umbaran. Bandung.

_____ Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 195; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4016). Citra Umbaran. Bandung.

_____ Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192)

_____ Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263). Citra Umbara Bandung.

Keputusan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2004, Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2004.

Keputusan Badan Kepegawaian Negara, Nomor 35 A Tahun 2004, Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi, Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2004.

WEBSITE: http://www.indomedia.com/poskup/2005/02/26/edisi26/2602_tiro1.htm.